

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Partisipasi pria dalam program KB di Kota Semarang maupun di Kecamatan Pedurungan masih sangat rendah. Adapun jenis KB yang paling banyak digunakan masyarakat adalah suntik.
2. Pelaksanaan advokasi dan KIE. Pelaksanaan advokasi dan KIE di Kecamatan Pedurungan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kegiatan penyuluhan sudah dilakukan secara rutin dan masyarakat merasakan manfaat dari informasi yang disampaikan. Disdalduk KB juga telah memasang jejaring yang bertugas dalam membantu PLKB. Namun, partisipasi pria dalam kegiatan penyuluhan KB masih sangat kurang. Tenaga penyuluh KB di Kecamatan Pedurungan terdiri dari pria dan wanita, tetapi di Puskesmas Tlogosari Kulon dan Tlogosari Wetan hanya terdapat petugas wanita yang melayani KB. Dalam menjalankan tugasnya, PLKB telah sesuai dengan tupoksi yang dimiliki meskipun masih terdapat kendala dari adanya PLKB yang kurang tertib. Pemerintah juga melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan para tenaga PLKB dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara langsung maupun tidak langsung.
3. Distribusi dan pengendalian alokon yang dilakukan oleh Disdalduk KB Kota Semarang telah berjalan dengan baik. Pendistribusian alat kontrasepsi dilaksanakan secara cepat sehingga ketersediaan alat

kontrasepsi di faskes-faskes selalu terjamin. Meskipun begitu, kendala yang masih ditemukan di lapangan yakni adanya petugas di suatu faskes yang belum melaporkan ketersediaan alokonnya secara tertib di aplikasi.

4. Ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Pedurungan yang sudah lengkap dan memadai menjadi salah satu faktor pendorong kesetaraan gender dalam implementasi program KB. Setiap pihak-pihak yang bertugas dalam melaksanakan pelayanan program KB, seperti Disdalduk KB dan petugas puskesmas di Kecamatan Pedurungan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan saling berkoordinasi. Selain itu, pemerintah juga telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan partisipasi KB pria dengan mengundang pakar pria dalam kegiatan penyuluhan, menghadirkan peserta KB pria untuk memberikan testimoni, dan memberikan uang pengganti tidak bekerja sebesar 1 juta rupiah untuk masyarakat yang menggunakan KB MOP.
5. Faktor penghambatnya adalah anggaran yang diberikan kepada Disdalduk KB masih sangat kurang bahkan anggaran untuk tahun 2025 semakin dipangkas. Kurangnya tenaga PLKB pria dan kurangnya partisipasi pria dalam kegiatan penyuluhan juga menjadi penghambat untuk terwujudnya kesetaraan gender dalam program KB di Kecamatan Pedurungan. Selain itu, sosial budaya juga menjadi faktor penghambat

sebab masih banyak anggapan negatif yang berkembang di masyarakat terkait penggunaan alat kontrasepsi pria.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan selama penelitian, diantaranya :

1. Mengadakan kegiatan penyuluhan berbasis komunitas untuk menghilangkan stigma di masyarakat mengenai KB pria.
2. Pelibatan perusahaan dalam program KB dengan melakukan kampanye di tempat kerja untuk membantu dalam menjangkau target yang disasar.
3. Pemerintah memberikan insentif kepada PKB/PLKB pria yang dapat berupa pelatihan gratis, sertifikasi, ataupun penghargaan untuk memotivasi masyarakat agar tertarik menjadi PKB/PLKB pria.
4. Melakukan evaluasi secara berkala terkait kinerja PKB/PLKB melalui laporan kerja dan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai bentuk umpan balik penerima layanan sehingga mampu meningkatkan kinerja PKB/PLKB.